

Riset Investigatif PT Masmindo Dwi Area (MDA): Awak Mas, Latimojong, Kabupaten Luwu

The Sawerigading Institute
Oktober 2026

Ringkasan Eksekutif

PT Masmindo Dwi Area sudah berada di tahap konstruksi proyek emas Awak Mas (peledakan pertama 16 Juni 2025, emas perdana ditargetkan akhir 2026), tetapi dokumen intinya belum terbuka dan tiga jalur investigasi layak diprioritaskan: sengketa lahan dan kompensasi, kelengkapan Kontrak Karya dan AMDAL, serta bukti pemenuhan kewajiban lingkungan.

- **Pemilik:** Indika Energy memegang 25% MDA langsung lewat PT Indika Mineral Investindo sejak September 2020 dan 100% setelah mengakuisisi Nusantara Resources pada Oktober 2021. Struktur 75/25 yang tercatat di dokumen 2020 bersifat historis; pemilik manfaat terkini tetap perlu dikonfirmasi lewat AHU.
- **Skala:** Kontrak Karya generasi VII seluas sekitar 14.390 ha (hak hingga 2050); kebutuhan lahan proyek sekitar 1.440 ha. Dua angka ini berbeda dan tidak boleh disamakan. Sumber daya 2,29 juta oz, cadangan 1,51 juta oz, produksi sekitar 100.000 oz per tahun.
- **Sengketa lahan:** DPRD Sulsel (Juni dan September 2026) dan Komisi III DPR RI (29 September dan 7 Oktober 2026) membahas klaim lahan; Komisi D menyebut dokumen Kontrak Karya yang diterima belum utuh. MDA menyatakan yang dibayar adalah kompensasi tanam tumbuh kepada pihak yang saat itu dinilai berhak, bukan pembebasan hak atas tanah.
- **Lingkungan:** MDA menyebut verifikasi Gakkum LHK (23-27 Juli 2024) tidak menemukan keterkaitan dengan banjir Mei 2024; Walhi menduga sebaliknya. Laporan lengkap belum terbit. Instansi pemerintah pada 2026 melaporkan pengawasan, tanpa data teknis yang bisa diuji publik.
- **Manfaat:** per Desember 2025, pekerja 2.090 orang dengan 1.540 (73,68%) warga Luwu, investasi terealisasi Rp5,3 triliun dan kontribusi penerimaan negara Rp437 miliar (pemaparan Pusdal LH Sulawesi-Maluku); angka ini juga perlu diuji dengan data primer.
- **Batas kesimpulan:** sampai 10 Oktober 2026 sumber yang ditelaah belum cukup untuk menyatakan MDA terbukti melanggar ketentuan tertentu, dan juga belum cukup untuk menyatakan sebaliknya.

Koreksi terhadap versi sebelumnya: (1) AMDAL yang dipakai adalah AMDAL 2017 beserta adendum dan izin lingkungan baru Oktober 2019, bukan hanya AMDAL 2017; (2) selisih jumlah pekerja (750 versus 2.000) tampaknya berasal dari definisi berbeda, dan angka resmi terbaru adalah 2.090 per Desember 2025; (3) RDP Komisi D berlangsung 2 atau 3 Juni 2026 menurut sumber yang berbeda.

Profil Korporasi dan Proyek

MDA adalah pemegang Kontrak Karya generasi VII dan pengembang Proyek Emas Awak Mas, dan linimasa resmi perusahaan menunjukkan izin operasi-produksi (2018) serta adendum AMDAL (2019) sudah ada sebelum Indika masuk sebagai pemegang saham ([linimasa MDA](#)).

Aspek	Informasi	Sumber
Nama dan proyek	PT Masmindo Dwi Area; Awak Mas Gold Project; komoditas emas	Situs MDA

Aspek	Informasi	Sumber
Lokasi	Desa Rante Balla, Kec. Latimojong, Kab. Luwu, Sulsel	Bisnis (7 Agu 2026)
Dasar hak	Kontrak Karya generasi VII	InvestorTrust (2023)
Luas wilayah kontrak	sekitar 14.390 ha	Situs MDA
Kebutuhan lahan proyek	sekitar 1.440 ha (1.444 ha, 10%, menurut paparan Indika)	TSI (Laporan Tahunan Indika 2024); Kumparan
Masa hak	hingga Juni 2050	Linimasa MDA
Status	konstruksi; emas perdana ditargetkan akhir 2026, komersial kuartal I 2027	Kumparan; Radar Makassar

Linimasa resmi perusahaan

Waktu	Peristiwa
Juni 2017	Studi kelayakan disetujui pemerintah
Januari 2018	Izin operasi dan produksi hingga Juni 2050
Maret 2018	Amandemen Kontrak Karya
Juli 2019	Adendum studi kelayakan disetujui
Oktober 2019	Adendum AMDAL disetujui dan izin lingkungan baru terbit
Desember 2019	Rencana PPM disetujui; kemitraan dengan Indika dikonfirmasi
Februari-Mei 2020	Perjanjian kemitraan MDA, Nusantara, dan Indika; Indika berinvestasi
September 2020	PT Indika Mineral Investindo memegang 25% saham MDA
Maret 2021	Kontrak FEED dengan Petrosea (tertulis "2121" di situs, hampir pasti salah ketik)

Kepemilikan dan Pengendalian

MDA dikendalikan penuh Grup Indika Energy sejak Oktober 2021, dan struktur 75% (Salu Siwa Pty Ltd, terkait Nusantara) dan 25% (PT Indika Mineral Investindo) yang tercatat pada 2020 adalah gambaran historis, bukan struktur terkini.

Waktu	Struktur atau peristiwa	Sumber
12 Des 2018	IMI membeli 19,9% saham Nusantara (AU\$7,68 juta)	Katadata
9 Des 2019	Term sheet tidak mengikat; Indika memegang 21,02% Nusantara; Petrosea disiapkan sebagai kontraktor FEED/EPC	Siaran pers Indika
Sep 2020	IMI memegang 25% saham MDA; sisanya 75% lewat Salu Siwa Pty Ltd terkait Nusantara	Linimasa MDA ; TSI (Laporan Tahunan MDA 2020, keterbukaan Indika Sep 2020)
6 Okt 2021	Akuisisi sekitar 72% sisa saham Nusantara (AU\$58,8 juta); Indika dan IMI memegang 100% Nusantara dan MDA	Siaran pers Indika

Indika menyebut MDA sebagai anak usaha yang dimilikinya 100% dalam paparan publik 27 November 2025 ([Kumparan](#)). Sebuah artikel bersponsor 2019 menulis Indika akan mengambil 40% MDA langsung; angka itu tidak sama dengan 25% yang tercatat resmi pada 2020, sehingga tidak dipakai.

Pendanaan: fasilitas Rp6,1 triliun (Juni 2025) untuk refinancing dan Awak Mas ([Bisnis](#)); US\$155 juta dari Bank DBS Indonesia untuk belanja modal MDA (5 Agustus 2026, [Bisnis](#)).

Kontraktor: Macmahon (jasa tambang, US\$463 juta, 7 tahun, ditunjuk 9 Januari 2025, [Bisnis](#)) dan Petrosea (FEED dan infrastruktur). Klaim kepemilikan akhir kedua kontraktor dalam [kolom RMOL](#) tidak disertai bukti dan tidak dipakai di sini.

Mengapa nama pengurus bukan bukti kepemilikan: nama pejabat dalam struktur manajemen tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan saham atau kendali ekonomi. Pengurus, pemegang saham langsung, pengendali tidak langsung, dan pemilik manfaat perlu dipetakan terpisah, dengan dokumen berikut:

- Akta pendirian dan seluruh akta perubahan anggaran dasar MDA.
- Daftar pemegang saham dan daftar khusus perseroan terbaru.
- Data badan hukum di AHU Kementerian Hukum.
- Laporan tahunan dan keterbukaan informasi Indika terbaru.
- Dokumen perubahan struktur Salu Siwa Pty Ltd dan hubungannya dengan Nusantara.
- Data pemilik manfaat yang disampaikan kepada instansi berwenang.

Halaman "Ownership Structure" di situs MDA hanya memuat gambar tanpa teks, sehingga isinya tidak dapat saya baca.

Konsesi, Legalitas, dan Perizinan

Rantai izin MDA tercatat dari studi kelayakan (2017) sampai adendum AMDAL (2019), tetapi nomor keputusan, lampiran, dan syarat teknisnya belum terbuka, dan Komisi D DPRD Sulsel masih menilai dokumen Kontrak Karya yang diterima belum utuh ([LuwuNews, 29 Sep 2026](#)).

Instrumen	Data yang Tercatat	Sumber	Pertanyaan Investigatif
Kontrak Karya	Generasi VII; disahkan 19 Jan atau 19 Feb 1998 (sumber berbeda); amandemen Maret 2018	InvestorTrust ; Mongabay	Apa isi lengkap KK dan seluruh amandemennya? MDA menyebutnya perjanjian bilateral dengan ESDM sehingga tidak diserahkan ke DPRD (Koran Akselerasi)
Penciutan wilayah	119.700 ha (1998), 89.650 ha (27 Jul 2000), 14.390 ha (10 Mar 2009)	Mongabay	Apa dasar hukum tiap penciutan?
Izin operasi-produksi	Januari 2018, hingga Juni 2050; Betahita mengutip SK 171.K/30/DJB/2018	Linimasa MDA ; Betahita	Apakah SK itu adalah izin operasi-produksi, dan apa lampirannya?
AMDAL dan izin lingkungan	AMDAL disetujui Januari 2017; adendum AMDAL dan izin lingkungan baru Oktober 2019	Mongabay; Linimasa MDA	Walhi menyebut cakupan AMDAL sekitar 18.000 ha, lebih besar dari konsesi (detikSulsel); DLH Luwu

Instrumen	Data yang Tercatat	Sumber	Pertanyaan Investigatif
			disebut tidak memegang salinan lengkap. Apakah kondisi lapangan sesuai dokumen?
Kawasan hutan	Sumber pro-perusahaan menyebut izin berada di Area Penggunaan Lain, bukan hutan lindung (Dunia Energi)	Dunia Energi	Tidak ada dokumen PPKH atau peta tata batas; Walhi menyebut sekitar 1.000 ha lahan kompensasi berada di kawasan berfungsi ekologis tinggi
Jaminan reklamasi dan pascatambang	Ketua Komisi D memperkirakan minimal Rp40 miliar, bisa dua kali lipat jika ada hutan lindung (28 Sep 2026)	LuwuNews	Perkiraan politik, bukan nilai final: berapa nilai kewajiban, dana yang ditempatkan, dan kekurangannya?
RKAB dan laporan lingkungan	RKAB 2021 ditahan ESDM dengan teguran (IDX Channel); DLH disebut kini mewajibkan laporan tiga bulanan (Koran Akselerasi)	IDX Channel	Apakah laporan sesuai kegiatan nyata dan hasil pemeriksaan? RKAB 2022-2026 belum ditelusuri
Listrik	PPA dengan PLN 24 Jul 2024, 23 MVA	Bisnis	Perjanjian 2017 (30 MW) tercatat di Mongabay
Kepastian lahan	MoU dengan Badan Bank Tanah, 23 Sep 2024; Koran Akselerasi menyebut koordinat tapak tumpang tindih dengan HPL Bank Tanah	Warta Ekonomi	Berapa luas tumpang tindih dan apa dasar HPL-nya?
Pengamanan	MoU keamanan dengan Polda Sulsel; status Objek Vital Nasional	Koran Akselerasi	Dokumen MoU belum dilihat

Gakkum LHK: pernyataan MDA sendiri menyebut verifikasi 23-27 Juli 2024 menilai rencana kegiatan sesuai dengan AMDAL 2019. Judul rilisnya mengklaim MDA "penuhi semua persyaratan perizinan", tetapi isinya hanya membahas perizinan lingkungan ([MDA, 12 Agu 2024](#)). Rilis itu diterbitkan perusahaan, jadi laporan Gakkum lengkap tetap perlu diminta.

Klaim yang belum terkonfirmasi: [Bisnis Sulawesi \(14 Apr 2025\)](#) menulis Gubernur Sulsel mengkritik rencana kemitraan MDA dengan Freeport-McMoRan; di sumber lain Freeport hanya muncul sebagai mitra Antam.

[Lokasi, Cadangan, Rencana Operasi, dan Tata Ruang](#)

Awak Mas berada di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, di kaki Pegunungan Latimojong; wilayah Kontrak Karya 14.390 ha bukan berarti seluruhnya akan dibuka, karena kebutuhan lahan proyek sekitar 1.440 ha ([Bisnis, 25 Sep 2025](#)).

Parameter	Data	Sumber
Sumber daya emas	2,29 juta oz	Bisnis (25 Sep 2025)
Cadangan	1,51 juta oz pada kadar 1,33 g/t (paparan Indika 2025 menyebut 1,37 g/t)	Bisnis; Kumparan
Produksi	sekitar 100.000 oz per tahun; umur tambang sekitar 15 tahun; tambang terbuka	Bisnis; InvestorTrust
Penemuan dan pengeboran	1988; sekitar 135 km pengeboran (sekitar 1.100 titik)	Siaran pers Indika 2021
Biaya proyek	US\$234 juta terpakai hingga Okt 2025; persiapan uji coba produksi 43% (Okt 2025)	Kumparan
Capex 2025	US\$158 juta	Bisnis
Deposit dalam satu KK	Awak Mas, Salu Bulu, dan Tarra	Kumparan; Business News 2019
Rencana lama (2018)	2,5 juta ton bijih per tahun selama 9 tahun, kadar sekitar 1,1 g/t, sianida, ampas ke Lembah Kande Api sekitar 5 km dari pusat Rante Balla	Mongabay

Perubahan angka antar tahun (cadangan 1,1 juta oz pada 2018-2019, 1,45 juta oz pada 2021, 1,51 juta oz pada 2024-2025; umur 9, 11, lalu sekitar 15 tahun) menunjukkan rencana tambang sudah berubah dari yang dibahas AMDAL 2017, sehingga skema tailing dan relokasi perlu dicek ulang pada dokumen terbaru. Satu media menulis cadangan "1,5 juta ton" ([EmitenNews](#)); itu tampak salah satuan dibanding juta oz.

Empat jenis peta yang harus dibedakan

- Peta Kontrak Karya berdasarkan koordinat dalam dokumen hukum.
- Peta tapak proyek: tambang, fasilitas pengolahan, jalan, tempat penimbunan, dan infrastruktur.
- Peta sosial-ekologis: permukiman, lahan pertanian, sumber air, daerah rawan longsor, kawasan hutan, dan bidang yang diklaim masyarakat.
- Peta tata ruang dan kawasan hutan, termasuk persetujuan penggunaan kawasan hutan bila relevan.

Keberadaan suatu bidang di dalam wilayah kontrak tidak dengan sendirinya menyelesaikan status hak atas tanah atau kompensasi.

Sengketa Lahan dan Kompensasi

Sengketa lahan terdokumentasi dan sudah dibahas dua lembaga legislatif, tetapi sumber yang ada belum cukup untuk menyimpulkan bahwa MDA merampas tanah, membayar kompensasi secara tidak sah, atau melanggar hukum tertentu.

Ada setidaknya tiga klaim berbeda yang tidak boleh dicampur, dan belum diketahui apakah ada yang bersinggungan.

Klaim	Pihak dan isi klaim (belum terverifikasi)	Tanggapan MDA	Status
A. Warisan di dalam wilayah KK	Dr. Basir menyatakan keluarganya memiliki tanah warisan sekitar 27.000 ha, sekitar 15.000 ha di dalam wilayah KK. Keluarga pengadu menyebut SKT 1990 dan 1992, NOP yang tidak aktif pada 2022, SPPT dan SKT baru 2021-2023, serta 1.140 nama penerima pembayaran (Radar Makassar ; Mata Sulse)	Senior Manager Legal Muhammad Rizki: yang dibayar kompensasi tanaman tumbuh, bukan pembebasan hak atas tanah, kepada pihak yang saat itu dinilai berhak; MDA menghormati proses hukum dan "agree to disagree"	Laporan ke Bareskrim 2022 dihentikan (SP3, kurang bukti); keluarga menyebut tiga SP2HP dan 26 saksi; RDP Komisi D 2-3 Juni 2026 tanpa kesimpulan
B. Tanah leluhur Rante Balla	Anak Adat Rante Balla Menggugat mengklaim 286,5 ha dialihkan ke MDA tanpa persetujuan ahli waris sah (Rumpun Titing)	Dirut Trisakti Simorangkir: operasi berdasar KK, tanam tumbuh sudah dibayar, dialog dibuka untuk verifikasi kepemilikan (Koran Akselerasi)	Lima RDP di DPRD Luwu tanpa hasil; RDPU Komisi III 29 Sep dan 7 Okt 2026; dua laporan polisi di Polres Luwu
C. Kebun cengkeh Dusun Nase	Pemilik 48 pohon cengkeh mengaku lahannya belum dibebaskan saat ditebang 16 Sep 2024; LBH Makassar menyebutnya pemaksaan (detikSulse)	Penggarap meminta harga di atas KJPP; dana dititipkan di Bank Mandiri Belopa (detikSulse)	Aliansi warga demo 17 Okt 2024 dengan 12 tuntutan (Koran SeruYA)

Hasil RDP Komisi III DPR RI, 7 Oktober 2026 ([Saorakyat](#)): MDA diminta menghentikan sementara seluruh kegiatan di lahan sengketa sampai ada kesepakatan resmi; Polda Sulse diminta menangani dugaan pidana dalam pembebasan lahan dan mengevaluasi dua laporan polisi (LP/B/298/VIII/2026 dan LP/B/76/III/2026); Polda dan Bupati diminta memfasilitasi mediasi dengan verifikasi kepemilikan; dan Surat Telegram STR/626/IX/RES.7.5/2026 diminta diawasi agar tidak ada tindakan represif. Anggota Komisi III Sudding membantah istilah "lahan tutupan" untuk pegunungan Rante Balla.

Angka resmi yang berbeda-beda

- Sekitar 1.100 ha terealisasi dari target 1.400 ha (kajian Unhas, penelitian lapangan 2024-2025).
- Kompensasi lahan 99% selesai per Oktober 2025 menurut paparan Indika ([Kumparan](#)).
- Pada 5 Februari 2026 Pj. Sekda Luwu menyebut 113 ha yang semula berstatus "bebas" kini menghadapi spekulasi harga dan klaim tumpang tindih; paparan itu juga menulis area sengketa 1.434 ha ([Pusdal LH Sulawesi-Maluku](#)). Angka 1.434 ha juga muncul sebagai target pembebasan ([Betahita](#)), sehingga maknanya perlu dikonfirmasi.
- Pengumuman tahap pembebasan April 2022 menyebut kompensasi "untuk tanah dan tanaman" ([Lini Sulse](#)), sedangkan di RDP 2026 MDA menyebut tanam tumbuh. Perbedaan rumusan ini layak ditanyakan.

Konteks kelembagaan: Satgas Percepatan Investasi yang diprakarsai Kejati Sulse menyebut "mafia tanah" sebagai hambatan ([Liputan6](#)); MDA menandatangani MoU dengan Badan Bank Tanah (23 September 2024). Sebuah tesis Unhas tentang konflik lahan di kawasan MDA

mencatat lima aksi demonstrasi 2020-2024, dugaan pungli di Ranteballa, dan pergantian tim pembebasan yang membuat sebagian pemilik menunda berkas ([tesis Unhas](#)).

Pertanyaan inti

- 1. Apa bentuk dan kekuatan hukum dokumen tanah yang diajukan, dan bagaimana riwayat peralihannya?
- 2. Berapa luas bidang yang benar-benar berada dalam tapak proyek, bukan sekadar dalam wilayah Kontrak Karya?
- 3. Siapa penerima kompensasi, berdasarkan dokumen apa, dan apakah semua pihak yang berhak telah diverifikasi?
- 4. Bagaimana nilai ditetapkan, adakah penilaian independen dan mekanisme keberatan?
- 5. Adakah putusan pengadilan, mediasi, atau kesepakatan tertulis yang menyelesaikan klaim tertentu?

Dampak Sosial dan Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi yang dilaporkan besar (Rp5,3 triliun investasi terealisasi, Rp437 miliar kontribusi penerimaan negara per Desember 2025), tetapi semua angka itu berasal dari paparan pemerintah daerah dan perusahaan dan belum diuji dengan data primer, sementara dampak keseharian seperti debu dan lalu lintas dikeluhkan warga.

Tenaga kerja lokal

Sumber	Waktu	Total pekerja	Pekerja lokal
Pusdal LH Sulawesi-Maluku	Des 2025	2.090	1.540 (73,68%)
Zona Luwu Raya (Wakil KTT)	Mar 2026	sekitar 2.000	sekitar 70%
Bupati Luwu (TSI, Diskominfo Luwu)	Okt 2025	tidak disebut	sekitar 70%
Koran Akselerasi (Disnakertrans)	Sep 2026	lebih dari 750 pekerja aktif	75-80% ber-KTP Luwu

Angka perlu diuji dengan data pekerja langsung dan kontraktor, domisili (Pokja Percepatan Investasi Luwu dibentuk karena pemindahan KTP instan dari luar daerah), jenis pekerjaan, upah, status kontrak, jaminan sosial, dan porsi pekerja lokal di posisi teknis dan manajerial. Selisih 750 versus sekitar 2.000 kemungkinan karena definisi "aktif" dan cakupan kontraktor.

Pemberdayaan masyarakat dan CSR

- Pemkab Luwu dan MDA meluncurkan penguatan Forum Desa MATAPPA dan Program Jaga Desa pada 5 Juni 2026 (TSI, Diskominfo Luwu). Ini fakta administratif; efektivitasnya perlu dinilai dari rencana PPM, anggaran per tahun dan per desa, penerima manfaat, evaluasi independen, dan mekanisme pengaduan.
- CSR terukur: Rp1,5 miliar untuk pipa air baku Perumda Tirta Latimojong; saat kemarau September 2026 perusahaan mengirim truk air dan pompa ke sekitar 70 ha sawah di empat desa. Ardianto Palla (PBH Andi Djemma) menilai nilainya kecil dibanding nilai emas dan menuntut audit anggaran PPM ([Koran Akselerasi](#)).
- Program lain: pasokan pangan sekolah lewat Koperasi Sipaktuo, Destana Latimojong, dan kajian kebencanaan dengan Unhas ([EmitenNews](#)); vendor lokal disebut PT Puma

Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, dan CV Belia Persada; BUMD PT Sulsel Citra Indonesia memasok BBM dan katering.

Dukungan dan keberatan

- Enam kepala desa ring 1 (Kadundung, Ranteballa, Boneposi, Tobaru, Ulusalu, Tolajuk) menyatakan dukungan tertulis lewat keterangan resmi MDA ([Dunia Energi, Jul 2024](#)); Komunitas Warga Lingkar Tambang membantah Walhi tanpa bukti independen ([Republik News](#)).
- Keberatan datang dari pemilik lahan (lihat Sengketa lahan), Walhi, LBH Makassar, PBH Andi Djemma, dan Perkumpulan Wallacea.
- MDA mengikuti prosesi Mangngolo Ri Arajang di Istana Kedatuan Luwu pada 15 Juni 2025 ([Liputan6](#)). Restu lembaga adat dan klaim keluarga pemilik lahan adalah dua hal yang perlu dipisahkan.
- Gubernur Sulsel meminta evaluasi sistem open pit dan keberpihakan pada BUMD; MoU MDA dengan PT Sulsel Citra Indonesia disebut belum ditindaklanjuti ([detikSulsel, 3 Jul 2025](#)).

Debu, lalu lintas, dan keselamatan

Warga Rante Balla memprotes debu tebal dan sempat memblokir jalan; MDA belum punya jalan industri sendiri sehingga truk Macmahon dan Petrosea memakai jalan desa. Pada 5 September 2026 seorang anak berusia 12 tahun meninggal dalam tabrakan dengan tronton pengangkut ekskavator di Jalan Poros Belopa-Latimojong; polisi masih mendalami ([Koran Akselerasi](#)). Keterkaitan kendaraan itu dengan MDA atau kontraktornya belum dinyatakan sumber mana pun.

Kerangka akademik

Penelitian Yusri, Sakaria, dan Sarongallo (2025) membahas dinamika konflik lahan di kawasan MDA lewat observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, dan mengidentifikasi konflik vertikal serta ketegangan kewenangan, kepentingan, dan klaim tanah (TSI; DOI). Temuan ini memberi kerangka analisis, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap sengketa punya penyebab atau pelaku yang sama.

Dampak Lingkungan dan Pengawasan

Penyebab banjir dan longsor Mei 2024 belum terbukti ke arah mana pun karena laporan verifikasi Gakkum LHK dan kajian Unhas belum terbit, sementara pengawasan pemerintah pada 2026 dilaporkan tanpa data teknis yang bisa diuji publik.

Banjir dan longsor Mei 2024

- **Dugaan Walhi Sulsel:** tutupan hutan Latimojong turun signifikan; sekitar 70% pembukaan lahan dikaitkan dengan tambang emas (legal dan ilegal) dan 30% dengan kebun warga, tanpa sumber data terbuka ([CNN Indonesia](#)). Analisis DAS Walhi menunjukkan tutupan hutan di bawah 30% pada sebagian besar DAS terdampak ([Betahita](#)).
- **Bantahan MDA:** tidak ada pembukaan masif dan perusahaan belum menambang (KTT Mustafa Ibrahim, Mei 2024, [detikSulsel](#)). Pj. Bupati Luwu menyalahkan pembalakan dan alih fungsi hutan oleh warga ([Koran SeruYA](#)).
- **Verifikasi Gakkum LHK (23-27 Juli 2024):** menurut MDA, tidak ditemukan keterkaitan dan rencana kegiatan sesuai AMDAL 2019; MDA juga menggandeng tim kajian kebencanaan Unhas ([Antara](#); [rilis MDA](#)). Laporan, metode, lokasi sampel, dan data tutupan lahan belum dipublikasikan.

- **Poin yang layak diuji:** pada paparan 27 November 2025 manajemen Indika menyebut kenaikan biaya proyek antara lain akibat "longsor 2024" ([Kumparan](#)). Lokasinya belum jelas; jika di tapak proyek, ini relevan bagi pernyataan "belum menambang" dan "tidak ada korelasi".
- **Korban:** Koran Akselerasi menyebut 14 orang meninggal dan 13 kecamatan terdampak pada Mei 2024; Koran SeruYA menulis "belasan" tanpa angka resmi.
- **Januari 2025:** longsor di Dusun Padang, Rante Balla, 3 meninggal; Antara menyebut hujan deras sebagai penyebab dan tidak menyinggung tambang, sedangkan Koran Akselerasi menyebut lokasinya di jalur akses site ([Antara](#)).

Pengawasan 2026

- **5 Februari 2026:** dalam forum Komite II DPD RI, Kepala Pusdal LH Sulawesi-Maluku menyatakan proyek masih konstruksi sehingga persyaratan AMDAL dan persetujuan lingkungan harus diselesaikan "secara clear"; pembukaan hutan berisiko limpasan permukaan tinggi di Luwu yang hujannya lebat; Pusdal akan mendukung akreditasi laboratorium internal MDA. MDA menyebut memasang AWLR (peringatan dini banjir) dan AWS (stasiun cuaca) ([Pusdal](#)).
- **1 September 2026:** DPMPTSP Luwu melaporkan kunjungan pengawasan yang memeriksa perizinan, K3, koordinat, tenaga kerja, jaminan sosial, dan pelaporan, dan menyatakan tidak menemukan pencemaran sungai maupun pengaduan atau konflik dalam pemeriksaan itu (TSI; halaman sumber tidak dapat saya buka).
- **Laporan lingkungan:** DLH disebut kini mewajibkan laporan pengelolaan dan pemantauan tiap tiga bulan, dan DLH Luwu disebut tidak memegang AMDAL lengkap karena perizinan lingkungan bergeser ke OSS pusat ([Koran Akselerasi](#)).

Keterangan pemerintah itu relevan, tetapi tanpa laporan pemeriksaan lengkap, data kualitas air, metode pengambilan sampel, dan rincian jaminan reklamasi, publik belum dapat menguji kesimpulan teknisnya.

Air, sianida, dan tailing

Risiko utama dari rencana 2018: pengolahan dengan sianida, ampas ke Lembah Kande Api, dan Sungai Bajo yang memasok PDAM dan irigasi ([Mongabay](#)). Desain fasilitas tailing, izin pembuangan, dan pemantauan air terbaru belum saya temukan di sumber terbuka; ini celah terbesar pada dokumen AMDAL dan adendumnya.

Matriks verifikasi

Aspek	Bukti yang diperlukan	Pertanyaan
Tutupan hutan	Peta historis dan citra satelit	Berapa perubahan tutupan lahan dan siapa pelakunya?
Kualitas air	Data hulu-hilir dan hasil laboratorium	Adakah perubahan parameter yang berkaitan dengan kegiatan proyek?
Erosi dan sedimentasi	Peta DAS, desain drainase, data sedimen	Bagaimana limpasan dan sedimentasi dikendalikan?
Limbah dan bahan kimia	Rencana pengelolaan dan manifest limbah	Bagaimana risiko pencemaran dikendalikan?
Keanekaragaman hayati	Inventarisasi flora, fauna, dan habitat	Adakah habitat penting yang berpotensi terdampak?
Reklamasi	Rencana, jaminan, indikator pemulihan	Apakah pemulihan didanai dan dapat diaudit?

Matriks ini adalah agenda verifikasi, bukan pernyataan bahwa pencemaran atau kerusakan pada setiap aspek telah terbukti.

Kronologi

Proyek ini berumur hampir 40 tahun sejak penemuan 1988, dan titik panasnya bergeser dari izin dan pendanaan (2017-2021) ke pembebasan lahan, bencana, dan klaim ulayat (2024-2026).

Tanggal	Peristiwa	Sumber
7 Okt 2026	RDP lanjutan Komisi III DPR RI: MDA diminta menghentikan sementara aktivitas di lahan sengketa 286,5 ha	Koran Akselerasi ; Saorakyat
29 Sep 2026	RDPU pertama Komisi III; Komisi D DPRD Sulsel (pernyataan 28 Sep) kembali memanggil MDA soal AMDAL, jaminan tambang, dan lahan	Koran Akselerasi ; LuwuNews
24 Sep 2026	Rencana sidak Komisi D ke tambang (surat 045.74/3652/DPRD)	Koran Akselerasi
5 Sep 2026	Tronton pengangkut ekskavator menabrak motor di Jl. Poros Belopa-Latimojong; anak 12 tahun meninggal	Koran Akselerasi
1 Sep 2026	Site visit DPMPTSP Luwu; disebut tidak menemukan pencemaran sungai	TSI (halaman sumber tidak dapat dibuka)
5 Agu 2026	Fasilitas US\$155 juta dari Bank DBS Indonesia	Bisnis
5 Jun 2026	Pemkab Luwu dan MDA meluncurkan Jaga Desa dan memperkuat Forum Desa MATAPPA	TSI (Diskominfo Luwu)
2-3 Jun 2026	RDP Komisi D DPRD Sulsel soal klaim lahan di wilayah KK (sumber menulis 2 atau 3 Juni)	Radar Makassar ; Mata Sulsel
13 Mar 2026	Manajemen: first gold akhir 2026, sekitar 2.000 pekerja	Zona Luwu Raya
5 Feb 2026	Forum Komite II DPD RI: Pusdal LH menekankan AMDAL dan mitigasi; paparan angka investasi dan tenaga kerja	Pusdal
27 Nov 2025	Public expose Indika: uji coba produksi akhir 2026, komersial Q1 2027; biaya US\$234 juta hingga Okt 2025	Kumparan
Okt 2025	Bupati Luwu: sekitar 70% pekerja MDA warga lokal	TSI (Diskominfo Luwu)
16 Jun 2025	Peledakan pertama; sehari sebelumnya prosesi Mangngolo Ri Arajang di Istana Kedatuan Luwu	Liputan6
14 Apr 2025	Gubernur Sulsel menyatakan akan menyurati Presiden meminta evaluasi sistem open pit	Bisnis Sulawesi ; detikSulsel
25 Jan 2025	Longsor di Dusun Padang, Rante Balla; 3 meninggal	Antara
9 Jan 2025	Macmahon ditunjuk kontraktor tambang, US\$463 juta	Bisnis
17 Okt 2024	Aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu di DPRD Luwu dengan 12 tuntutan	Koran SeruYA
25 Sep 2024	Warga disebut dibubarkan dengan gas air mata di Pos 6 (klaim aliansi)	Koran SeruYA
23 Sep 2024	MoU MDA dengan Badan Bank Tanah	Warta Ekonomi

Tanggal	Peristiwa	Sumber
16 Sep 2024	48 pohon cengkeh ditebang di bawah pengawalan TNI-Polri; MDA menyebut dana ganti rugi dititipkan di Bank Mandiri Belopa	detikSulsel
12 Agu 2024	MDA menerbitkan rilis hasil verifikasi Gakkum LHK	MDA
24 Jul 2024	PPA listrik dengan PLN, 23 MVA	Bisnis
23-27 Jul 2024	Verifikasi lapangan Gakkum LHK atas pengaduan masyarakat	Antara; rilis MDA
3 Mei 2024	Banjir bandang dan longsor di 13 kecamatan Luwu; Walhi menduga pembukaan hutan, MDA membantah	Betahita; Indonesia CNN
1 Apr 2022	Pengumuman data dan tahap pembebasan lahan di Ranteballa dan Boneposi	Lini Sulsel
6 Okt 2021	Indika menuntaskan akuisisi Nusantara; memegang 100% MDA	Indika
26 Mei 2021	ESDM menahan RKAB 2021 dan memberi teguran	IDX Channel
Sep 2020	IMI memegang 25% saham MDA	Linimasa MDA
Okt 2019	Adendum AMDAL disetujui dan izin lingkungan baru terbit	Linimasa MDA
12 Des 2018	Indika membeli 19,9% Nusantara	Katadata
Mar 2018	Amandemen Kontrak Karya	InvestorTrust
Jan 2018	Izin operasi dan produksi hingga Juni 2050	Linimasa MDA
Jun 2017	Studi kelayakan disetujui	Linimasa MDA
15 Agu 2017 / Jan 2017	Perjanjian listrik 30 MW dengan PLN / AMDAL disetujui	Mongabay
10 Mar 2009	Konsesi diciutkan menjadi 14.390 ha	Mongabay
27 Jul 2000	Konsesi diciutkan dari 119.700 ha menjadi 89.650 ha	Mongabay
1998	Kontrak Karya generasi VII (19 Jan atau 19 Feb 1998, sumber berbeda)	InvestorTrust; Mongabay
1988	Penemuan deposit Awak Mas	Indika

Pertanyaan Investigatif dan Agenda Dokumen

Tiga belas pertanyaan di bawah ini belum terjawab oleh sumber terbuka yang dibaca, dan masing-masing menunjuk dokumen yang bisa diminta lewat permohonan informasi publik atau diverifikasi di lapangan.

No	Pertanyaan	Bukti yang dicari	Pemegang dokumen
1	Apakah tapak tambang, jalan akses, dan area tailing berada di kawasan hutan, dan adakah hutan lindung seperti disinggung Komisi D?	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, peta tata batas, overlay tutupan	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Sulsel

No	Pertanyaan	Bukti yang dicari	Pemegang dokumen
2	Apa isi Kontrak Karya 1998 dan amandemen Maret 2018, dan mengapa tanggal pengesahan berbeda antarsumber?	Naskah KK dan addendum	Ditjen Minerba ESDM (PPID); DPRD Sulsel sudah menerima sebagian
3	Apa cakupan AMDAL 2017 dan adendum Oktober 2019 (sekitar 18.000 ha atau 14.390 ha), dan apakah ada adendum baru untuk umur tambang sekitar 15 tahun?	ANDAL, RKL-RPL, persetujuan lingkungan (OSS)	DLH Sulsel dan Luwu, KLH
4	Apa dasar dan jenis SK No. 171.K/30/DJB/2018 dan izin operasi-produksi Januari 2018?	SK dan lampiran peta	Ditjen Minerba
5	Berapa nilai jaminan reklamasi dan pascatambang, dan sudah ditempatkan atau belum?	Penetapan jaminan, bukti penempatan	ESDM, inspektur tambang, bank penjamin
6	Apa isi hasil verifikasi Gakkum LHK Juli 2024 (pengaduan 25/ADU-LHK/BPPHLHK.3/5/2024) dan kajian Unhas?	Berita acara, laporan	Gakkum LHK Sulawesi; Unhas; MDA
7	Di mana "longsor 2024" yang disebut Indika menaikkan biaya proyek, dan bagaimana dengan pernyataan "belum menambang" pada Mei 2024?	Keterbukaan informasi, laporan inspektur tambang, citra satelit multi-tahun	Indika (BEI), ESDM, citra Planet atau Landsat
8	Siapa 1.140 penerima pembayaran, atas dokumen apa, dan mengapa dokumen SKT 1990-1992 dan SPPT-SKT baru 2021-2023 dipersiapkan?	Daftar penerima, berkas pembayaran, dokumen tanah	Desa, BPN Luwu, MDA, KJPP
9	Bagaimana 286,5 ha di Rante Balla berpindah ke MDA, dan apa hubungannya dengan klaim keluarga pada RDP DPRD Sulsel?	Berkas pembebasan, laporan KJPP, rekening titipan di Bank Mandiri Belopa	Desa, BPN Luwu, PN Belopa, MDA
10	Berapa luas tumpang tindih konsesi dengan HPL Badan Bank Tanah, dan apa maksud angka 1.434 ha dan 113 ha dalam paparan Februari 2026?	Sertifikat HPL, peta overlay, risalah forum DPD RI	ATR/BPN, Bank Tanah, Pemkab Luwu
11	Apa peran Satgas Percepatan Investasi dan aparat dalam pembebasan lahan dan pengawalan penebangan 16 Sep 2024?	SK Satgas, notulen, surat tugas	Kejati Sulsel, Pemkab Luwu, Polda Sulsel
12	Berapa royalti, pajak, dan PNBPN yang mengalir ke Luwu, dan bagaimana BUMD SCI dilibatkan?	Ketentuan royalti KK, MoU SCI, data kontribusi fiskal	ESDM, Pemprov Sulsel, SCI
13	Apa status dua laporan polisi (LP/B/298/VIII/2026 dan LP/B/76/III/2026),	Surat penyidik, konfirmasi Indika	Polres Luwu, Polda Sulsel, Indika

No	Pertanyaan	Bukti yang dicari	Pemegang dokumen
	dan benarkah ada rencana kemitraan MDA dengan Freeport-McMoRan?		

Narasumber yang layak didekati: Walhi Sulsel, PBH Andi Djemma, LBH Makassar, Perkumpulan Wallacea, Anak Adat Rante Balla Menggugat, Kedatuan Luwu, DLH Luwu dan Sulsel, BPN Luwu, Pusdal LH Sulawesi-Maluku, Komisi D DPRD Sulsel, serta manajemen MDA (Trisakti Simorangkir, Mustafa Ibrahim, Agus Siswanto, Yudhi Purwandi, Muhammad Rizki).

Daftar periksa pengumpulan dokumen

Korporasi

- ☐ Akta dan daftar pemegang saham terbaru MDA
- ☐ Data pemilik manfaat dan hubungan antarperusahaan
- ☐ Laporan tahunan serta keterbukaan informasi Indika 2025-2026

Perizinan

- ☐ Kontrak Karya lengkap beserta seluruh amandemen
- ☐ Dokumen studi kelayakan dan persetujuan teknis terbaru
- ☐ Persetujuan lingkungan, AMDAL 2017, adendum 2019, dan adendum berikutnya
- ☐ Persetujuan penggunaan kawasan hutan atau bukti status APL

Pertanahan

- ☐ Peta koordinat Kontrak Karya dan tapak proyek
- ☐ Daftar bidang, hasil pengukuran, dan riwayat hak tanah
- ☐ Daftar kompensasi, bukti pembayaran, dan keberatan warga
- ☐ Risalah RDP DPRD Sulsel (Juni dan September 2026) serta dokumen yang diserahkan perusahaan
- ☐ Dokumen HPL Badan Bank Tanah dan MoU 23 September 2024

Lingkungan

- ☐ Laporan lengkap verifikasi Gakkum LHK 2024
- ☐ Hasil kajian kebencanaan yang melibatkan Unhas
- ☐ Data kualitas air dan pemantauan lingkungan 2024-2026, termasuk akreditasi laboratorium internal
- ☐ Bukti penempatan jaminan reklamasi dan rencana pascatambang

Sosial dan ekonomi

- ☐ Data tenaga kerja langsung dan kontraktor
- ☐ Rencana, anggaran, serta evaluasi PPM dan CSR
- ☐ Rekap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya
- ☐ Data kontribusi fiskal dan realisasi manfaat ekonomi lokal

Kesimpulan Sementara dan Prioritas

Sampai 10 Oktober 2026 sumber yang ditelaah belum cukup untuk menyatakan MDA terbukti melakukan pelanggaran tertentu, tetapi sengketa lahan yang dibahas DPRD dan DPR, permintaan dokumen yang belum dipenuhi utuh, dan kebutuhan verifikasi lingkungan memberi dasar kuat untuk melanjutkan pemeriksaan dokumen dan wawancara lapangan.

Tiga jalur investigasi diprioritaskan:

1. **Dokumen pertanahan dan kompensasi:** bagaimana hak atas bidang diverifikasi, siapa penerima kompensasi, dan apa dasar pembayaran (klaim A, B, dan C pada bagian Sengketa lahan).
2. **Kesesuaian persiapan operasi dengan kewajiban lingkungan dan pertambangan:** AMDAL 2017 dan adendum 2019, hasil verifikasi Gakkum LHK, data pemantauan lingkungan, status kawasan hutan, dan jaminan reklamasi diperiksa sebagai satu rangkaian bukti.
3. **Distribusi manfaat ekonomi:** tenaga kerja lokal, anggaran PPM dan CSR, kompensasi, kontribusi fiskal, dan dampak terhadap mata pencaharian diukur dengan data aktual.

Prioritas pertama adalah memperoleh Kontrak Karya lengkap beserta lampirannya, AMDAL dan seluruh adendurnya, serta dokumen kompensasi lahan yang terkait langsung dengan klaim masyarakat. Tiga kelompok dokumen ini akan menentukan apakah investigasi bisa bergerak dari pemetaan isu ke pengujian fakta yang lebih tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kronologi dan daftar rujukan dalam dokumen ini adalah sampel sumber yang relevan, bukan penghitungan statistik seluruh berita tentang MDA; analisis media yang lengkap membutuhkan pencarian sistematis berdasarkan kata kunci, rentang tanggal, media, narasumber, jenis klaim, dan koreksi berita.

Catatan Metodologis

Dokumen ini membedakan empat jenis informasi, dan menyebut suatu klaim tidak berarti klaim itu terbukti.

1. **Fakta:** dilaporkan dalam dokumen perusahaan atau lembaga publik.
2. **Kutipan:** pernyataan pihak tertentu, ditulis dengan atribusi.
3. **Klaim:** masih harus diverifikasi, misalnya luas tanah warisan atau jumlah penerima kompensasi.
4. **Pertanyaan analitis:** bahan penyelidikan lanjutan, dikumpulkan di bagian Pertanyaan investigatif.

Dokumen primer belum tersedia dalam penelusuran ini: Kontrak Karya lengkap beserta lampirannya, AMDAL dan seluruh adendum, laporan verifikasi Gakkum LHK, peta bidang tanah, dan bukti pembayaran kompensasi. Kesimpulan tentang kepatuhan hukum, kepemilikan tanah, atau penyebab dampak lingkungan tidak boleh ditarik hanya dari ringkasan pemberitaan.

Daftar Rujukan

Kolom "Dibuka" menunjukkan apakah saya membaca halamannya sendiri pada 10 Oktober 2026 (Ya), atau sumber itu berasal dari riset awal TSI dan belum saya buka ulang (TSI), atau tidak dapat dibuka (Gagal). Kolom keandalan menandai dokumen primer, pernyataan pihak berkepentingan, liputan, atau opini.

Sumber	Tanggal	Jenis dan keandalan	Dibuka
Indika: akuisisi Nusantara selesai	6 Okt 2021	Siaran pers perusahaan; primer untuk kepemilikan	Ya
Indika: rencana tambah kepemilikan	9 Des 2019	Siaran pers perusahaan	Ya
Indika: Laporan Tahunan 2024	2025	Dokumen perusahaan; sumber daya, cadangan, kebutuhan lahan	TSI
Indika: Disclosure of Information, Nusantara	Sep 2020	Keterbukaan informasi	TSI
MDA: Laporan Tahunan 2020	2021	Dokumen perusahaan; struktur 75/25	TSI
MDA: Milestone	n/a	Situs perusahaan; linimasa 2017-2021	Ya
MDA: Awak Mas Gold Project	n/a	Situs perusahaan; luas 14.390 ha	Ya
MDA: Ownership Structure	n/a	Situs perusahaan; hanya gambar	Ya (tanpa teks)
MDA: Managements	n/a	Situs perusahaan	TSI
MDA: rilis verifikasi Gakkum LHK	12 Agu 2024	Rilis perusahaan; pihak berkepentingan	Ya
Pusdal LH Sulawesi-Maluku: kawal persiapan operasi	5 Feb 2026	Lembaga publik; angka investasi dan pekerja	Ya
DPMPTSP Luwu: site visit Awak Mas	1 Sep 2026	Lembaga publik	Gagal (robots)
Diskominfo Luwu: Fordes MATAPPA dan Jaga Desa	5 Jun 2026	Lembaga publik	TSI
Diskominfo Luwu: tenaga kerja lokal	2025	Lembaga publik	TSI
Katadata: Indika masuk tambang emas	12 Des 2018	Media	Ya
Business News: Nusantara funding deal	9 Des 2019	Konten bersponsor; rendah	Ya
Mongabay: Emas di Kaki Latimojong	23 Jun 2018	Liputan lingkungan; baik	Ya
InvestorTrust: konstruksi 2024	23 Nov 2023	Media; tanggal KK dan amandemen	Ya
IDX Channel: pemerintah pantau MDA	26 Mei 2021	Media; pernyataan Ditjen Minerba	Ya
Lini Sulsel: proses pembebasan lahan	3 Apr 2022	Media lokal; prosedur pembebasan	Ya
Bisnis: PPA PLN	26 Jul 2024	Media bisnis	Ya

Sumber	Tanggal	Jenis dan keandalan	Dibuka
Bisnis: kontraktor Macmahon	14 Jan 2025	Media bisnis; berdasar keterbukaan informasi	Ya
Bisnis: Awak Mas game changer	25 Sep 2025	Media bisnis; cadangan, capex	Ya
Bisnis: kredit DBS	7 Agu 2026	Media bisnis	Ya
Kumparan: public expose Indika	27 Nov 2025	Media; pernyataan manajemen; angka "smelter" US\$426 juta perlu dikonfirmasi	Ya
Warta Ekonomi: MoU Bank Tanah	26 Sep 2024	Media	Ya
CNN Indonesia: Walhi soal banjir	7 Mei 2024	Media; klaim Walhi tanpa tanggapan MDA	Ya
Betahita: biang banjir	7 Mei 2024	Media lingkungan; data DAS dari Walhi	Ya
detikSulsel: Walhi minta setop	6 Mei 2024	Media; memuat tanggapan KTT MDA	Ya
Antara: MDA bantah penyebab banjir	12 Agu 2024	Media; pernyataan MDA; keterangan foto menyebut Enrekang, kemungkinan keliru	Ya
Koran SeruYA: hentikan tambang	6 Mei 2024	Media lokal; memuat bantahan Pj. Bupati	Ya
Antara: santunan longsor	21 Mar 2025	Media; longsor 25 Jan 2025	Ya
detikSulsel: LBH soal cengkeh	19 Sep 2024	Media; memuat tanggapan MDA	Ya
detikSulsel: alasan Masmindo	18 Sep 2024	Media; penjelasan MDA, dana titipan	Ya
EmitenNews: first gold 2026	13 Sep 2024	Media; memuat pernyataan Kejari Luwu	Ya
EmitenNews: Hari Bumi	28 Apr 2025	Media bernada perusahaan; satuan cadangan keliru	Ya
Liputan6: Satgas Percepatan Investasi	13 Nov 2024	Media; pernyataan Kajati	Ya
Liputan6: first blasting	Jun 2025	Media; tanpa nomor izin	Ya
Dunia Energi: dukungan 6 desa	7 Jul 2024	Pernyataan MDA; klaim status APL	Ya
Republik News: KWL T	20 Agu 2025	Pernyataan kelompok; tanpa bukti independen	Ya
Bisnis Sulawesi: Gubernur dan Freeport	14 Apr 2025	Media; klaim Freeport tidak terkonfirmasi	Ya
detikSulsel: surat ke Presiden	3 Jul 2025	Media; tanpa tanggapan MDA	Ya
Zona Luwu Raya: tahap pengembangan	13 Mar 2026	Media lokal; pernyataan Wakil KTT	Ya

Sumber	Tanggal	Jenis dan keandalan	Dibuka
Koran SeruYA: aksi Aliansi	18 Okt 2024	Media lokal; 12 tuntutan; tanpa tanggapan MDA	Ya
RRI: Mengurai benang kusut sengketa lahan	5 Jun 2026	Media publik	Gagal
Radar Makassar: RDP DPRD Sulsel	5 Jun 2026	Media; klaim Dr. Basir dan tanggapan MDA	Ya
Mata Sulsel: SKT 1990 dan 1.140 penerima	30 Agu 2026	Media; klaim keluarga belum terverifikasi	Ya
LuwuNews: Komisi D panggil Masmindo	29 Sep 2026	Media; tanpa tanggapan MDA	Ya
Koran Akselerasi: hak informasi	7 Sep 2026	Media lokal; banyak fakta baru, verifikasi silang	Ya
Koran Akselerasi: dua wajah	Sep 2026	Media lokal; bagian akhir opini	Ya
Koran Akselerasi: konsesi yang mengurung	23 Sep 2026	Media lokal	Ya
Koran Akselerasi: Komisi III	Okt 2026	Media lokal; rincian RDP 7 Okt	Ya
Saorakyat: Komisi III	Okt 2026	Media; nama Kapolres berbeda dengan Koran Akselerasi	Ya
Tesis Unhas: konflik lahan	2025	Akademik; penulis dan tahun tidak tercantum di teks	Ya
Yusri dkk.: Land Conflict Dynamics (JISEM)	2025	Akademik	TSI
Aletheia: opini Latimojong	3 Mei 2025	Opini; tanpa data lapangan	Ya
RMOL: Tambang Emas dan Oligarki	3 Jul 2025	Opini; klaim kepemilikan tanpa bukti, jangan dikutip sebagai fakta	Ya